



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PENGUMUMAN NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 865 Tahun 2021 Tanggal 29 April 2021 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe akan melaksanakan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

I. KRITERIA PELAMAR

- Formasi Umum merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana tersebut dalam pengumuman ini.
- Penyandang Disabilitas merupakan pelamar yang menyandang disabilitas fisik namun memenuhi ketentuan mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik dengan melampirkan surat keterangan Dokter Pemerintah yang menyatakan jenis dan tingkat disabilitasnya.

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar yang ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
11. Berkelakuan baik;
12. Calon pelamar hanya boleh mendaftar 1 (satu) kali pada 1 (satu) instansi/daerah dalam satu periode pelaksanaan seleksi;
13. Pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis ijazah;

14. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
15. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
16. Peserta seleksi yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa (seperti LPDP) dan telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang bersangkutan berstatus PNS.

III. PERSYARATAN KHUSUS

1. Bukti registrasi sewaktu melakukan pendaftaran online harap disimpan dengan baik;
2. Membuat surat permohonan dengan tulisan tangan tegak bersambung menggunakan tinta berwarna hitam dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 10.000,- dan ditujukan kepada Walikota Lhokseumawe;
3. Asli KTP elektronik;
4. Pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah (foto studio);
5. Asli Ijazah;
6. Asli Transkrip Nilai;
7. Asli Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku bagi Tenaga Kesehatan;
8. Akreditasi Perguruan Tinggi (dapat berupa hasil tangkapan layar website);
9. Asli Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah bagi pelamar disabilitas;

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai Tanggal 30 Juni s.d 21 Juli 2021;
2. Pada saat pendaftaran secara online pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran online dan memperhatikan setiap keterangan/instruksi/peringatan yang muncul di halaman online tersebut;
3. Calon pelamar seleksi penerimaan CPNS Tahun 2021 wajib memiliki Surat Elektronik (email) dan Nomor Handphone yang masih aktif;
4. Untuk melakukan pendaftaran secara online, calon pelamar wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nomor Kartu Keluarga dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga pelamar;

5. Pada saat pendaftaran pelamar wajib mengupload/mengunggah:
 - a. File scan surat permohonan asli (berwarna) yang ditulis dengan tulisan tangan tegak bersambung menggunakan tinta berwarna hitam dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 10.000,- (format pdf. ukuran maksimal 300 KB);
 - b. File pasfoto terbaru berlatar belakang merah (format jpeg. ukuran maksimal 200 KB);
 - c. File scan KTP asli (format pdf. ukuran maksimal 200 KB);
 - d. File scan Ijazah asli (format pdf. ukuran maksimal 800 KB);
 - e. File scan Transkrip Nilai asli (format pdf. ukuran maksimal 600 KB);
 - f. File scan Surat Tanda Registrasi (STR) asli yang masih berlaku bagi Tenaga Kesehatan (format pdf. ukuran maksimal 800 KB);
 - g. File scan Akreditasi Perguruan Tinggi (format pdf. ukuran maksimal 800 KB);
 - h. File scan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah bagi pelamar disabilitas (format pdf. ukuran maksimal 800 KB);
6. Semua informasi atau data yang diisi dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisi tidak benar maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut.

V. PROSES SELEKSI

1. SELEKSI ADMINISTRASI

- a. Seleksi Administrasi dilakukan terhadap pelamar yang telah melakukan registrasi *online*;
- b. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai dengan jadwal;

2. SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

- a. Seleksi Kompetensi Dasar menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* yang terdiri dari: Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP);

- b. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas/*passing grade* yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- c. Hasil SKD secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh instansi melalui laman <https://lhokseumawekota.go.id>
- d. Pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi peserta wajib membawa Kartu Tanda Peserta Seleksi dan KTP asli;
- e. Peserta seleksi yang identitasnya tidak sesuai dengan Kartu Tanda Peserta Seleksi dan KTP tidak dapat mengikuti seleksi kompetensi;

3. SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

- a. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar yang telah dinyatakan lulus dan telah memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
- b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)*;
- c. Jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah formasi pada masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
- d. Bobot hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah 40% untuk nilai SKD dan 60% untuk nilai SKB.

VI. KETENTUAN LAIN

- 1. Penetapan dan pengumuman peserta yang dinyatakan lulus oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) berdasarkan hasil integrasi dari nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang;
- 2. Pengumuman hasil seleksi dapat dilihat melaluipapan pengumuman dan website <https://lhokseumawekota.go.id> dan/atau bentuk lain yang memungkinkan;
- 3. Tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang akan diinformasikan lebih lanjut;

4. Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2021;
5. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila di kemudian hari diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
6. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2021 hanya dapat dilihat melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> atau laman media sosial (Instagram) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe: @bkpsdm_lhokseumawe;
7. Apabila pelamar diketahui memberikan keterangan atau data yang tidak benar di kemudian hari dan dapat dibuktikan maka Panitia Seleksi Daerah (Panselda) berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dan dilaporkan sebagai tindak pidana kepada pihak yang berwajib;
8. Seleksi penerimaan CPNS Tahun 2021 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN**;
9. Keputusan Panitia Penerimaan CPNS Tahun 2021 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

Lhokseumawe, 23 Juni 2021

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

dto.

SUAIDI YAHYA

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2021**

TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	5	PUSKESMAS BANDA SAKTI	
2	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS BLANG CUT	
3	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN D-IV SANITASI/KESEHATAN LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS MUARA DUA	
TOTAL			7		

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	ANALIS AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI NEGARA S-1 ADMINISTRASI PUBLIK S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	
2	ANALIS BAHAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	S-1 HUKUM	1	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
3	ANALIS BENCANA	S-1 SOSIOLOGI	1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
4	ANALIS BERITA	S-1 KOMUNIKASI	1	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOLER SEKRETARIAT DAERAH	
5	ANALIS DESA DAN KELURAHAN	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK S-1 ADMINISTRASI PUBLIK S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
6	ANALIS DOKUMEN PERIZINAN	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
7	ANALIS JABATAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK S-1 EKONOMI S-1 MANAJEMEN S-1 PSIKOLOGI D-IV PSIKOLOGI D-IV EKONOMI S-1 ADMINISTRASI D-IV MANAJEMEN S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	DAPAT DIISI DISABILITAS
8	ANALIS KEOLAHRAGAAN	S-1 KEOLAHRAGAAN	2	DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
9	ANALIS KEOLAHRAGAAN	S-1 KEOLAHRAGAAN	1	DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
10	ANALIS KEOLAHRAGAAN	S-1 KEOLAHRAGAAN	1	BAGIAN KEISTIMEWAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH	
11	ANALIS KEPEMUDAAN	S-1 ILMU POLITIK	1	DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
12	ANALIS KEPEMUDAAN	S-1 ILMU POLITIK	2	DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
13	ANALIS KESEHATAN IBU DAN ANAK	S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT	1	DINAS KESEHATAN	
14	ANALIS MITIGASI BENCANA	S-1 PSIKOLOGI	1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
15	ANALIS OBJEK WISATA	S-1 PARIWISATA	2	DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA	

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
16	ANALIS PENANAMAN MODAL	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
17	ANALIS PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN	S-1 SOSIOLOGI	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
18	ANALIS PEREKONOMIAN	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1	BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH	
19	ANALIS POLA KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	DINAS KESEHATAN	
20	ANALIS REHABILITASI MASALAH SOSIAL	S-1 PSIKOLOGI	1	DINAS SOSIAL	
21	ANALIS TENAGA KERJA	S-1 PSIKOLOGI	1	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
22	PENATA LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI D-IV AKUNTANSI	1	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
23	PENGADMINISTRASI HUKUM	D-III EKONOMI MANAJEMEN	1	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	
24	PENGADMINISTRASI HUKUM	D-III EKONOMI MANAJEMEN	1	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
25	PENGAWAS OLAH RAGA	S-1 OLAHRAGA	1	DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
26	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI	1	DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
27	PENGELOLA KEFARMASIAN	D-III FARMASI	1	DINAS KESEHATAN	
28	PENGELOLA KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	1	KECAMATAN MUARA DUA	
29	PENGELOLA KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
30	PENGELOLA OBJEK WISATA	D-III PARIWISATA	1	DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
31	PENGELOLA PERSIDANGAN	D-III MANAJEMEN	1	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	
32	PENGELOLA SARANA KESEHATAN LINGKUNGAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	DINAS KESEHATAN	
33	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
34	PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
35	PENGELOLA SITUS ATAU WEB	D-III TEKNIK INFORMATIKA D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
36	PENYULUH KEPEMUDAAN	S-1 ILMU POLITIK	1	DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
37	PENYULUH KEPEMUDAAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK S-1 ADMINISTRASI NEGARA S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	2	DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
38	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	
39	PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	1	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	
40	PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
41	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI	1	DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
42	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI	1	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
43	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI	1	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
44	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI	1	DINAS SOSIAL	
45	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
46	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	S-1 AKUNTANSI	1	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
47	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	S-1 AKUNTANSI	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
48	PENYUSUN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 ILMU HUKUM	1	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
49	PENYUSUN RENCANA INVESTASI	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
50	TEKNISI LISTRIK, TELEPON, AC, DAN LIFT	D-III TEKNIK LISTRIK	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
51	TEKNISI LISTRIK, TELEPON, AC, DAN LIFT	D-III TEKNIK LISTRIK	1	KECAMATAN BANDA SAKTI	
52	TEKNISI PRODUKSI MULTIMEDIA DAN WEB	D-III TEKNIK INFORMATIKA D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
53	VERIFIKATOR ANGGARAN	D-III AKUNTANSI	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
54	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III PERPAJAKAN	1	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	
55	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III PERPAJAKAN	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
56	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III PERPAJAKAN	1	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	
57	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III PERPAJAKAN	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
58	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III PERPAJAKAN	1	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
59	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III PERPAJAKAN	1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
60	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III PERPAJAKAN	1	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	
61	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III PERPAJAKAN	1	DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
62	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III PERPAJAKAN D-III AKUNTANSI	1	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	
TOTAL			66		

WALIKOTA LHOKEUMAWE

dto.

SUAIDI YAHYA

Contoh format surat permohonan

Perihal : Permohonan

Lhokseumawe, Juli 2021

Kepada Yang Terhormat :
Walikota Lhokseumawe

di –

Lhokseumawe

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : (sesuai dengan ijazah)
Tempat/Tanggal Lahir : (sesuai dengan ijazah)
Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-laki
Pendidikan : (sesuai dengan ijazah)
Agama :
Formasi yang dilamar :
Alamat : (sesuai KTP)
Nomor Hp :

Dengan ini menyampaikan surat lamaran untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2021.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, disampaikan berkas kelengkapan sebagai berikut :

- a. File scan surat permohonan asli (berwarna) yang ditulis tangan, tegak bersambung dengan tinta berwarna hitam dan ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- (format pdf. maksimal 300 KB);
- b. File pasfoto terbaru berlatar belakang merah (format jpeg. maksimal 200 KB);
- c. File scan KTP asli (format pdf. maksimal 200 KB);
- d. File scan Ijazah asli (format pdf. maksimal 800 KB);
- e. File scan Transkrip Nilai asli (format pdf. maksimal 600 KB);
- f. File scan Surat Tanda Registrasi (STR) asli bagi Tenaga Kesehatan (format pdf. maksimal 800 KB);
- g. File scan Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi (format pdf. maksimal 800 KB);
- h. File scan Surat Pernyataan 5 (lima) poin (format pdf. maksimal 300 KB);
- i. File scan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah bagi pelamar disabilitas (format pdf. maksimal 800 KB).

Demikian surat permohonan ini dibuat, adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Atas perhatian dan pertimbangan dari Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai 10.000

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : (sesuai dengan ijazah)
Tempat/Tanggal Lahir : (sesuai dengan ijazah)
Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-laki
Pendidikan : (sesuai dengan ijazah)
Agama :
Formasi yang dilamar :
Alamat : (sesuai KTP)
Nomor Hp :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Lhokseumawe, Juli 2021

Yang membuat pernyataan,

Materai 10.000

(Nama Terang)